



Kota Yogyakarta Serious Wujudkan Zero Gepeng

YOGYA (MERAPI) - Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menegaskan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan Jogja Zero Gepeng melalui penanganan serius terhadap gelandangan, pengemis, dan pengamen (gepeng).

Hasto menekankan bahwa



MERAPI-Dok Pemkot Yogyakarta
 Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo memberikan pengarahannya saat Apel Pilar Sosial.

persoalan gelandangan tidak boleh dibiarkan berlarut. Pemkot Yogyakarta, kata dia, harus melakukan pendataan menyeluruh sekaligus merumuskan solusi. "Gelandangan itu harus kita urus. Harus didata, mengapa bisa jadi gelandangan, mengapa tidak punya rumah, dan nanti so-

lusinya bagaimana. Dinas Sosial bisa memberikan jawaban atas itu. Setelah diurus, kita harus berani moratorium. Jangan sampai muncul gelandangan baru terus-menerus," tegas Hasto saat memimpin Apel Pilar Sosial dalam Rangka Jogja Zero Gepeng Tahun 2025 di Grha Pandawa, Balai Kota Yogyakarta, Minggu (28/9).

Hal yang sama juga berlaku bagi para pengamen. Berdasarkan data Pemkot, saat ini tercatat 53 orang pengamen dalam 23 kelompok. Menurut Hasto, jumlah ini harus dikelola dengan baik agar tidak bertambah.

"Tugas kita mengurus pengamen yang sudah ada, bukan membiarkan tambah banyak. Saya akan persuasif dengan restoran, hotel, dan tempat-tempat ramai agar mereka bisa memberikan ruang bagi pengamen untuk

tampil tanpa harus mengganggu lalu lintas atau pejalan kaki," jelasnya.

Sebagai contoh, Hasto menyebut kawasan Embung Giwangan dan Taman Pintar dapat dijadikan ruang alternatif bagi pengamen untuk berkarya. Di lokasi-lokasi tersebut, pengunjung bisa terhibur tanpa adanya paksaan seperti yang sering terjadi di perempatan jalan. "Kalau di lampu merah itu dilarang. Selain mengganggu lalu lintas, juga menyalahi fungsi trotoar. Bahkan ada hotel yang pernah protes karena pengamen di perempatan dekat hotel membuat tamu terganggu," tambahnya.

Hasto mengingatkan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Yogyakarta harus dijadikan momentum perubahan, bukan sekadar perayaan seremonial. "HUT Kota itu jangan ha-

nya jadi pesta. Ini harus menjadi titik balik, momentum perubahan untuk menjadikan kota kita lebih tertata, lebih manusiawi, dan lebih baik ke depan," ujarnya.

Hasto Wardoyo juga menegaskan bahwa Pemkot Yogyakarta tidak hanya sekadar menertibkan, tetapi juga memberi solusi dengan menyediakan ruang dan alternatif. Strategi ini diharapkan bisa menciptakan suasana kota yang lebih nyaman, tertib, dan tetap memberi kesempatan kepada pengamen untuk mencari nafkah secara bermartabat. "Saya tidak ingin sekadar mengembalikan mereka ke daerah asal. Itu justru menambah masalah. Yang penting kita carikan tempat yang layak di kota ini," jelasnya.

Kegiatan Apel Pilar Sosial Jogja Zero Gepeng sendiri bertujuan memperkuat siner-

gi, koordinasi, serta komitmen bersama dalam penanganan masalah sosial di Kota Yogyakarta. Apel diikuti unsur Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pelopor Perdamaian (Pordam), Pendamping PKH, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-Kota Yogyakarta.

Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Maryustion Tonang menjelaskan, Pemkot Yogyakarta menekankan prinsip mengurus, bukan mengusir dalam penanganan gepeng.

"Gelandangan itu pendekatannya humanis. Kita mengurus, bukan mengusir. Artinya, mereka kita arahkan ke UPT Rumah Layanan Lansia atau ke Camp Assessment, tergantung kebutuhannya," ungkapnya. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005